

Daftar Pustaka

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Pengelolaan Keuangan Desa**. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2003). **Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi**. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2016). **Kecamatan Ngebel Dalam Angka 2017**. Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2016). **Kecamatan Pulung Dalam Angka 2017**. Ponorogo.
- Bastian, Indra. (2015). **Akuntansi untuk Kecamatan & Desa**. Jakarta: Erlangga.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko. (2003). **Membangun Good Gvernance di Desa**. Yogyakarta : IRE Press.
- Fitrawan, T Mondale dkk. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). **Jurnal**. Vol.3, No.2, Hlm.196-212.
- Ghozali, Imam. (2016). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**. Semarang: BPF Universitas Diponegoro.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. **Jurnal**. Vol.2, No.1, Hlm.15-30.
- Harjono, dkk. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. **Binus Business Review**. Vol.5, No.2, Hlm.537-550.
- Herli, Mohammad dan Hafidhah. (2017). Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan di Desa. **Jurnal**. Vol.VII, No.1, Hlm.43-52.
- Hidayati, Nurul dan In Wijayanti. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorgo. **Jurnal**. Vol.2, Hlm. 1-7.
- M, John Echols dan Hassan Shadily. (1963). **Kamus Indonesia Inggris**. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <http://kenalponorogo.com/lanjuti-laporan-masyarakat-terkait-dana-desa-kejari-ponorogo-periksa-tpk-babandan/>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2018.
- Ilham, Muhammad Arisaputra. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Reformasi Agraria di Indonesia. **Jurnal**. Vol.28, No.2, Hlm.188-216.

Indah, dan Asri Dwija Putri. (2018). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. **Jurnal**. Vol.22, No.2, Hlm.1308-1334.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). **Paparan Kemenkeu**. (<http://www.djpk.depkeu.go.id>). diakses pada 20 Oktober 2017.

Kumalasari, Deti dan Ikhsan Budi Riharjo. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. **Jurnal**. Vol.5, No.11, Hlm.1-15.

Mahmudi, 2010. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). **Buku Saku Dana Desa**. Jakarta.

Muslimin, dkk. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. **Jurnal**. Vol.11, No.1, Hlm.79-85.

Nasehatun, Lina dan Nur Anisa. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. **Jurnal**. Vol.10, No.2, Hlm. 273-288.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 **Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat**.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 **Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa**.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 **Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 **Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 **Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil**.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 **Tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.**

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 **Tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.**

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 **Tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.**

Puji, Titiek Astuti dan Yulianto. (2016). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. **Jurnal.** Vol.1, No.1, Hlm.1-14.

Putra dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). **Jurnal.** Vol.1, No.6, Hlm.1203-1212.

Rahmatunnisa, Mudiwati. (2013). Analisa Kritis Atas *Good Governance*. **Jurnal.** Vol.02, Hlm.7-18.

Santoso, Slamet. (2015). **Penelitian Kuantitatif: Metode dan Langkah Pengolahan Data.** Ponorogo:UNMUH Ponorogo Press.

Septianis, Ray Kartika (2014). Partisipasi Masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. **Jurnal.** Vol.4, No.3, Hlm.179-188.

Sopannah dan Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. **SNAVI.** Surabaya.

Sugiyono. (2017). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Bandung: Alfabeta

Umami, Risyah dan Idang Nurodin. (2017). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. **Jurnal.** Vol.6 Edisi.11, Hlm.74-80.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 **Tentang Desa**

Wiratna, V. Sujarweni. (2015). **Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.** Yogyakarta :Pustaka Baru.

Wiradarma, Made Setiawan . (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungblu, Kab. Buleleng). **Jurnal.**Vol.7, No.1, Hlm. 1-11.

www.surabayanewsweek.com. Diakses pada tanggal 29 Desember 2017.